

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muhammad Hatta merupakan salah satu tokoh nasional Indonesia yang ikut serta dalam kemerdekaan Indonesia. Ia dilahirkan di Bukittinggi, Sumatra Barat pada tahun 1902. Setelah menyelesaikan pendidikan di Prins Hendrik Handels (PHS) tahun 1919-1921 di Jakarta ia berangkat ke Belanda untuk belajar ekonomi politik di Rotterdam.¹

Muhammad Hatta lebih aktif di politik setelah Ia menjadi ketua di perhimpunan Indonesia. Organisasi ini didirikan pada tahun 1908. Sebelumnya organisasi ini diberi nama Perhimpunan Hindia (*Indische Vereniging*), yang kemudian pada tahun 1925 diganti menjadi perhimpunan Indonesia. Forum ini merupakan tempat berkumpulnya para pelajar Indonesia yang berada di Belanda. Orientasi dari forum ini mulai memasuki hubungan politik tanah air ketika banyak pelajar nasionalis yang melanjutkan studinya di Belanda yaitu mereka yang ketika di Indonesia telah bergerak dalam *Jong Java* (Jawa Muda), *Jong Sumatranen Bond* dan Juga Budi Utomo.²

Pemikiran-pemikiran Hatta banyak dikemukakan dalam tulisan dan pidato. Ia menulis dalam *Indonesia Merdeka*, majalah PI dan berkala lain, terutama yang diterbitkan oleh kalangan sosialis Belanda, seperti *De Socialist*, *De Vlam*, *Rect en Vrijheid* di negeri Belanda. Dan juga dalam terbitan berkala yang terbit di Indonesia, termasuk *Persatuan Indonesia* dan *Daulat Ra'jat*. Dalam terbitan

¹ Mohammad Hatta, *Memoir*. (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 190.

² Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik*. (Jakarta: LP3ES, 1990). hlm. 41.

berkala di Indonesia ini tulisan Hatta bukan saja mengikuti perkembangan di tanah air melainkan memberi pendapat dan saran mengenai perkembangan tersebut.³ Karena ia juga berpidato di luar Belanda tulisan-tulisan dan pidatonya di Eropa lebih bermaksud untuk mengenalkan Indonesia dan bukan Hindia Belanda tentang cita-cita kebangsaan, penderitaan rakyat banyak, kekejaman perlakuan pemerintah Belanda di Indonesia terhadap rakyat dan pergerakan kebangsaan, juga cara-cara yang menurutnya perlu dilakukan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan itu.⁴

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mulai memasuki masa yang disebut dengan masa revolusi. Masa ini merupakan masa dimana terjadi konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia melawan Kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak Sekutu. Rangkaian peristiwa ini terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan kemerdekaan oleh Kerajaan Belanda pada 27 Desember 1949. Pada masa tersebut Muhammad Hatta diangkat sebagai wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Soekarno.

Setelah selesai masa revolusi, Indonesia mulai memasuki masa demokrasi liberal atau disebut juga dengan demokrasi parlementer. Masa ini diawali dengan dibentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat) setelah selesai KMB (Konferensi Meja Bundar) yang dilaksanakan di Den Haag Belanda. Ir. Soekarno ditetapkan sebagai Presiden RIS pada 17 Desember 1949 dan Mohammad Hatta dijadikan

³Deliar Noer, *Mohammad Hatta Biografi Politik...*, hlm. 53.

⁴Karangan dan pidato Hatta ini dikumpulkan dan diterbitkan kembali dalam VG, 1952. KK, 1953, dan kemudian juga dalam *Fotrait a Patriot* (Den Hag: Mouton, 1972) buku- buku ini juga memuat tulisan dan pidatonya sesudah ia kembali di Indonesia, termasuk diantaranya zaman merdeka. Deliar Noer, *Mohammad Hatta, Biografi Politik.....* hlm 54.

sebagai Perdana Menteri RIS. Bersama kabinetnya Mohammad Hatta dilantik oleh Presiden pada tanggal 20 Desember 1949.⁵

Kabinet RIS dibawah Pimpinan Hatta yang dilantik pada tanggal 20 Desember 1949. hanya memerintah sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950. Dalam usia yang sangat singkat itu, RIS dengan satu-satunya pemerintahan di bawah Perdana Menteri Hatta yang sekaligus wakil Presiden RI harus memecahkan masalah yang timbul akibat perang kemerdekaan dan masalah-masalah lainnya . Pada akhirnya RIS berubah menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ..⁶

Dari mulai tahun 1950 sampai tahun 1955 Indonesia mengalami instabilitas politik. Dimana pada masa tersebut terdapat empat buah kabinet yang memerintah sehingga rata-rata tiap tahun terdapat pergantian kabinet. Kabinet tersebut secara berturut-turut ialah kabinet Natsir (September 1950 – Maret 1951), Kabinet Sukiman (April 1951 – April 1952), Kabin Wilopo (April 1952 – Juli 1953) dan kabinet Ali Sastromidjojo 1 (Juli 1953 Agustus 1955).⁷

Pada periode tahun 1955-1959 juga terdapat tiga kali pergantian kabinet. diantaranya yaitu : Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956), Kabinet Ali Sastromidjojo II (Maret 1956-Maret 1957) dan Kabinet Djuanda (Maret 1957-Juli 1959). Periode ini dimulai dengan dilaksanakannya Pemilihan Umum 1955 dan berakhir dengan diumumkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tentang kembalinya ke UUD 45. Dari sini ternyata walaupun sudah diadakan pemilihan umum sesuai dengan aturan permainan demokrasi Barat yang menurut

⁵ Marwati Djoened. dkk, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI...*, hlm. 269.

⁶Marwati Djoened. dkk, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI...*, hlm. 302.

⁷ Marwati Djoened. dkk, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI...*, hlm. 307.

peninjau-peninjau luar negeri berjalan dengan bersih, pemerintahan yang stabil tetap tidak tercapai. Rata-rata kabinet memerintah selama 1 tahun. Dengan demikian, kiranya terbukti bahwa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer tidak sesuai bagi kondisi di Indonesia.⁸

Sistem demokrasi parlementer yang pada mulanya dianut akhirnya harus jatuh karena aktivitas politik yang keras. Indonesia lalu menganut demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin bagi Sukarno adalah suatu demokrasi khas Indonesia yang jauh lebih baik dan lebih tepat untuk diterapkan. Sukarno mengasalkan konsepnya pada tradisi yang telah berkembang lama di desa-desa jauh sebelum Indonesia merdeka. Yaitu suatu demokrasi yang dipimpin atau dibimbing oleh seorang tetua yang bersifat kebabakan. Atau bisa juga dikatakan suatu cara yang lebih baik di mana tidak akan ada persaingan dan pertentangan keras yang tak terdamaikan, karena adanya sang pemimpin yang mampu menengahi.

Masa demokrasi terpimpin ini dimulai pada tahun 1959 tepatnya setelah presiden mengeluarkan Dekrit Presiden 05 Juli 1959 tentang kembali kepada UUD 1945. Dalam Dekrit tersebut Presiden Soekarno sekaligus panglima tertinggi Angkatan Perang menetapkan pembubaran konstituante, memberlakukan kembali UUD 1945, membentuk Majelis Permusyawaratan Sementara (MPRS) dan membentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).⁹

Dekrit Presiden yang dikeluarkan pada 5 Juli tersebut ternyata menimbulkan respon dari berbagai pihak, ada yang pro maupun ada yang kontra. Salah satu

⁸ Marwati Djoened. dkk, *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI...*, hlm. 316.

⁹ *Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang Kembali Kepada Undang Undang dasar 1945*. Kementerian Penerangan RI 1959.

respon tersebut datang dari Muhammad Hatta. Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden pada tahun 1956 karena perbedaan pandangan yang tak terdaimakan dengan Sukarno muncul sebagai kritikus yang tajam. Hatta melontarkan kritik sekaligus tawaran konsepsinya dalam tulisan yang berjudul “*Demokrasi Kita*”. Tulisan tersebut dimuat dalam majalah *Pandji Masyarakat* pada tahun 1960 yang diasuh oleh tokoh muslim ternama Hamka. Walaupun selama demokrasi terpimpin Hatta tidak ikut secara langsung memangku jabatan dalam pemerintahan, namun beliau tetap aktif mengamati, juga mengkritik kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat dan tak sesuai dengan aturan undang-undang.

Topik ini sangat menarik untuk diteliti karena dalam kajian ini tidak terlalu banyak peneliti sejarah yang secara khusus meneliti tentang sejarah mengenai sistem politik di Indonesia, terutama mengenai respon Mohammad Hatta. Selain itu juga, penelitian ini bisa melengkapi *khazanah* keilmuan mengenai tokoh Mohammad Hatta yang bisa dijadikan sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya. Untuk membatasi kajian ini maka batasan spasialnya difokuskan pada respon Mohammad Hatta terhadap kebijakan-Presiden Soekarno terutama dalam bidang politik tentang Dekrit Presiden 05 Juli tahun 1959, untuk itu juga tahun 1959 diambil karena disesuaikan dengan tahun terjadinya peristiwa tersebut.

Maka dari itu judul yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah “*Respon Mohammad Hatta Terhadap Dekrit Presiden 05 Juli 1959*”

B. Rumusan Masalah

Berasarkan Latar Belakang di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Latar Belakang Lahirnya Dekrit Presiden 05 Juli 1959.?
2. Bagaimana Respon Muhammad Hatta terhadap Isi Dekrit Presiden 05 Juli tahun 1959 ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengatahui Latar Belakang Lahirnya Dekrit Presiden 05 Juli 1959
2. Memahami Bagaimana Respon Muhammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 05 Juli tahun 1959

D. Kajian Pustaka

Penelitian tentang tokoh Nasional Indonesia seperti Muhammad Hatta dan penelitian tentang situasi politik Indonesia masa demokrasi terpimpin pun sebenarnya sudah banyak diteliti sesuai dengan perspektifnya masing-masing.

Penelitian terdahulu seperti :

1. Penelitian Siti Garini Indrastuti dalam skripsi yang berjudul “*Muhammad Hatta dan Ekonomi Kerakyatan Dalam Islam*” Program studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitiannya lebih menekankan pada Riwayat hidup Muhammad Hatta dan paham-paham yang mempengaruhinya tentang ekonomi kerakyatan serta bagaimana pemikiran ekonomi kerakyatan yang tertuang dalam koperasi menurut Islam.
2. Penelitian Angga Permana dalam skripsi yang berjudul “*Kebijakan Politik Wakil Presiden Muhammad Hatta Pada Masa Revolusi*

Kemerdekaan RI (1945-1949)” Program studi Sejarah Peradaban Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung 2016. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai Riwayat hidup Muhammad Hatta dan dari mulai kelahirannya hingga sampai kepada aktivitas politik Muhammad Hatta selain itu penelitian ini lebih berfokus pada kebijakan politik Muhammad Hatta sebagai wakil presiden Indonesia juga merangkap sebagai perdana Menteri RIS. Diantara kebijakannya yaitu: Maklumat Presiden No. X 16 - 10 – 1945, Perundingan Renville dan melakukan rasionalisasi kedalam dan keluar. Juga dibahas mengenai dampak kebijakan Hatta terhadap politik Indonesia (1945-1949).

3. Penelitian Rudi Hartono Mahasiswa Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang (UNES) tahun 2005 dalam skripsi yang berjudul *”Sejarah Pertentangan Soekarno Hatta dan pengaruhnya terhadap kebijakan politik Indonesia pada tahun 1956-1965”*. Penelitian ini mengkaji tentang sejarah pertentangan Soekarno Hatta mulai dari keduanya terlibat dalam organisasi pergerakan sampai keduanya duduk dalam pemerintahan. Penelitian ini lebih berfokus pada keadaan politik Indonesia tahun 1956-1965 serta sejarah pertentangan Soekarno- Hatta, khususnya pada pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran kedua tokoh ini dan pengaruhnya terhadap kebijakan politik Indonesia tahun 1956-1959
4. Penelitian Basuki Ismail mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta dalam Tesis nya yang berjudul *Paham Demokrasi Sosial Mohammad Hatta Studi Pemikiran Politik Indonesia*. Penelitian

ini lebih berfokus pada konsepsi pemikiran Hatta tentang demokrasi sosial yaitu bagaimana Hatta sampai kepada paham demokrasi sosial ditinjau dari latar belakang yang mempengaruhinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengumpulan sumber dengan melakukan studi kepustakaan terhadap tulisan-tulisan Muhammad Hatta tentang demokrasi politik, ekonomi dan sosial. selain itu juga sumber-sumber dari tulisan-tulisan para ahli yang membahas Hatta dan pemikirannya.

5. Penelitian Hamdan Hamid mahasiswa jurusan Akidah Filsafat Universitas Syarif Kasim dalam skripsinya yang berjudul "*Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin 1959-1965)*" Penelitian ini membahas bagaimana Terjadinya peralihan sistem ketatanegaraan dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin menjadi catatan penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia umumnya dan penulis khususnya. Walaupun peralihan sistem tersebut selalu menuai pro dan kontra dalam penerimaan maupun penerapannya, namun ada beberapa persoalan pokok yang perlu kita pahami sekaligus dalam terkait dengan sistem demokrasi ala Soekarno tersebut, yaitu bagaimana sesungguhnya konsep demokrasi yang pernah diterapkan Soekarno dan apa yang menjadi landasan beliau dalam menerapkannya. Hal inilah yang menjadi fokus utama penulis dalam meneliti penerapan sistem demokrasi terpimpin dalam perspektif Soekarno.

6. Penelitian Wawan Tunggal Seorang Pimpinan Redaksi Tabloid Hukum dan HAM (Berita Keadilan) di bawah Jawa Pos Group pada 1998-2000. Dalam bukunya yang berjudul *Demi Bangsa Pertentangan Soekarno vs Hatta* yang diterbitkan oleh Pustaka Gramedia Utama Jakarta pada tahun 2003. Buku ini membahas mengenai pertentangan Soekarno Hatta dari masa pergerakan, masa kemerdekaan hingga masa demokrasi terpimpin. Namun dalam buku ini tidak membahas lebih jauh tentang penyebab rusaknya demokrasi terpimpin dengan faktor Tentara AD, PKI yang masuk dalam konstelasi politik. Buku ini lebih fokus pada sudut pandang yang melatar belakangi terjadinya perbedaan paham antara Soekarno dan Hatta selanjutnya.

Adapun penelitian tentang "*Respon Muhammad Hatta Terhadap Dekrit Presiden 05 Juli Tahun 1959 Tentang Kembali kepada UUD 1945*" belum ada peneliti yang secara khusus mengkajinya. Penelitian ini lebih berfokus kepada bagaimana kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno pada masa tahun 1959 terutama dalam bidang politik yaitu mengenai Dekrit Presiden 05 Juli 1959 juga sejarah yang melatarbelakangi lahirnya kebijakan tersebut sehingga muncul sebuah kritikan yang sangat tajam dari seorang Muhammad Hatta yang merupakan rekan seperjuangannya ketika masih bersama bahu membahu dalam membangun Negara Indonesia. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tulisan-tulisan mengenai pemikiran Hatta yang diterbitkan dalam majalah, buku maupun surat-surat pribadi yang ditujukan kepada Presiden

Soekarno. Selain itu juga sumber-sumber dari para ahli yang membahas mengenai pemikiran Hatta.⁹

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan metode sejarah. Metode sejarah merupakan sebuah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau melalui sumber-sumber atau data yang ditemukan¹⁰. Metode penelitian sejarah ini mencakup empat langkah berikut, yakni heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penjelasan secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut:

Tahapan pertama adalah pengumpulan data atau sumber sejarah. Tahapan kedua tahapan kritik atau memilah dan memilih sumber data yang diperoleh. Tahapan ketiga adalah interpretasi atau pemberian makna pada sumber sejarah yang sudah dikritisi. Tahapan keempat adalah historiografi yaitu melakukan rekonstruksi dengan melakukan penulisan sejarah berdasarkan sumber data yang telah dikumpulkan dan dikritisi serta telah mengalami interpretasi tadi.¹¹

1. Heuristik

Secara bahasa menurut Notosusanto, heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu *heuriskein*, artinya sama dengan *to find* yang berarti tidak hanya menemukan yaitu mencari dahulu. Sedangkan secara istilah, tahapan heuristik merupakan tahapan yang diarahkan pada penjajakan, pencarian, dan pengumpulan sumber-sumber yang diteliti, baik terdapat dilokasi penelitian, temuan benda maupun sumber lisan. Pada tahap pertama ini peneliti berusaha

¹⁰ Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. (Jakarta: Yayasan Universitas Indonesia. 1975). hlm. 32.

¹¹ Sulasaman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2014). hlm. 90.

mencari dan mengumpulkan sumber yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.¹²

Dalam penelitian yang berjudul "Respon Mohammad Hatta Terhadap Dekrit Presiden 05 Juli 1959" ini penulis mencoba mengumpulkan beberapa sumber dari berbagai perpustakaan serta kearsipan demi menunjang penelitian. Dalam mencari sumber-sumber ini penulis mendatangi perpustakaan seperti perpustakaan Nasional, perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora, Perpustakaan Nasional RI, Arsip Nasional RI dan perpustakaan Batu Api Jatinangor. Sumber-sumber yang telah dikumpulkan diantaranya yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Tertulis

1. Arsip / Dokumen

- a) Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945. 5 Juli 1959. Kementerian Penerangan RI
- b) Pidato Presiden Soekarno Pada Upacara Penyerahan Kembali Mandat Kabinet Karya Kedalam Tangan Beliau, Istana Merdeka 6 Juli 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia

¹² Sulasaman. *Metodologi Penelitian Sejarah...*, hlm. 93.

- c) Pidato Presiden Soekarno Pada Upacara pelantikan Anggota Kabinet Kerja, Istana Merdeka 10 Djuli 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia
- d) Pidato Presiden Soekarno Pada Upacara Pelantikan Menteri Menteri Muda Daripada Kabinet Kerja, Istana Bogor 13 Juli 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia
- e) Pidato Presiden Soekarno Pada Pelantikan Anggota-Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Dewan Perancang Nasional dan Pengawas Kegiatan Aparatur-Aparatur Negara di Istana Negara 15 Agustus 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia
- f) Tjeramah Presiden Soekarno Mengenai Demokrasi Terpimpin Dimuka Kursus Atase Militer, Istana Negara 16 April 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia
- g) Susilo Suharto. 1961. Ictisar Manipol Usdek. Malang
- h) Indonesia Pilihlah Demokrasimu (Pidato Presiden Soekarno Pada hari Sumpah Pemuda TGL. 28 Oktober 1956 dan Pidato Presiden Soekarno Pada resepsi Konngres PGRI ke-8 tgl. 30 Okt. 1956) : Jajasan Prapantja.
- i) *Res Publica lagi*, *Res Publica* Amanat Presiden Kepada sidang pleno konstituante 22 April 1959. Departemen Penerangan RI

2. Koran

- a) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Senin 9 Februari 1959. ” Dalam Demokrasi Harus Ada Pimpinan, Tanpa Iti Akan Timbul Anarki” Terjemah Moh. Hatta di Sumedang
- b) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Kamis 19 Februari 1959. “Angkatan Darat Bersikap Bulat Dukung Demokrasi Terpimpin”
- c) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Jumat 20 Februari 1959 “ Sidang Kabinet Hasilnya Baik Sekali” Penjelasan PM. Juanda
- d) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Sabtu 21 Februari 1959 “Kembalilah Pada Undang Undang Dasar 1945” Presiden Soekarno di depan Seminar Pancasila
- e) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Selasa 24 Februari 1959 “ Presiden : Kabineten Menurut UUD 1945”
- f) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Selasa 19 Mei 1959. “Dewan Konstituanten Supaya Terima UUD 1945 Tanpa Perubahan”
- g) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Jumat 12 Juni 1959. “Demkrasi Terpimpin Tidak Perlu Pimpinan Rakyat” Prsiden Soekarno

- h) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Selasa 23 Juni 1959 “ Djalan Lain Tidak Ada Kecuali Kembali ke UUD 1945”
- i) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Selasa 30 Juni 1959 “Insyaallah, Dalam Waktu Singkat Saya Sudah Akan Ambil Keputusan Tegas ” Presiden Soekarno
- j) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Senin 6 Juli 1959 “Dewan Kostituante Dinyatakan Bubar”
- k) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Rabu 8 Juli 1959 “Pergantian UUD Harus Berarti Perubahan Ke Jiwa Proklamasi 45” Presiden Soekarno
- l) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Kamis 9 Juli 1959. “Presiden Bekerja Keras Untuk Menyusun Kabinet Baru Berdasarkan uud 1945”
- m) Koran Harian Umum, Surat Kabar Kebangsaan edisi Rabu 15 Juli 1959n “ Kabinet Kerja Menurut Penilaian Pers. Ibu Kota”

3. Majalah

- a) Panji masyarakat. “*Demokrasi Kita*”. edisi 4 Mei 1960 oleh Dr. Mohammad Hatta
- b) Hikmah ”*Dualisme Dalam Kepemimpinan di Indonesia*” edisi 15 Agustus 1959

- c) Hikmah “*Konstituante Dalam Ujian*” r. Majalah Edisi 16 Mei 1959
- d) Hikmah “*Betapakah Jadinya Demokrasi Terpimpin itu?*”. Majalah Edisi 29 Januari 1959
- e) Hikmah “*Saat Yang Menentukan Dalam Konstituante Tentang Dasar Negara.*” Majalah Islam Populer. Edisi 29 Januari 1959

4. Buku

- a) Muhammad Hatta, 2014. *Demokrasi Kita*, Bandung : Segarsy
- b) Mohammad Hatta, 1982. *Memoir*, Jakarta : Pt. Tintamas Indonseia.
- c) Deliar Noer, 1990. *Muhammad Hatta Biografi Politik*, Jakarta : LP3ES
- d) Hatta, Muhammad, Agung, 1987, *Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- e) Muhtar Lubis, 1988. *Hati Nurani Melawan Kedzaliman (Surat-Surat Bung Hatta Kepada Presiden Soekarno 1957-1965)*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

2. Kritik

Dalam metode penelitian sejarah, tahap kedua setelah pengumpulan data adalah tahap kritik. Tahapan ini merupakan tahap penyeleksian terhadap sumber-sumber yang telah kita dapatkan di lapangan, baik berupa sumber

tertulis, lisan, maupun benda sesuai prosedur yang telah ada. seorang sejarawan dalam merekonstruksi sejarah harus menguji beberapa sumber agar mendapatkan sebuah fakta yang dapat dipertanggung jawabkan. terdapat dua tahapan dalam kritik ini, yaitu kritik ekstern dan kritik intern.¹³

Kritik ekstern bertujuan menguji otentisitas atau keaslian suatu sumber. Aspek ekstern mempersoalkan apakah sumber itu asli atau palsu sehingga sejarawan harus mampu menguji tentang keakuratan dokumen sejarah tersebut, mislanya waktu pembuatan dokumen, bahan atau materi dokumen, Aspek ekstern harus dapat menjawab, apakah sumber itu merupakan sumber yang dikehendaki (otentisitas), apakah sumber itu asli atau turunan (orisinilitas), apakah sumber itu masih utuh atau sudah diubah (soal integritas).¹⁴

Sedangkan kritik intern bertujuan untuk mendapatkan sumber yang memiliki tingkat validitas atau keakuratan yang tinggi. Dalam hubungannya dengan kritik intern ini, Louis Gottschalk mengatakan bahwa “setelah menetapkan teks otentik dan menentukan apa yang sungguh-sungguh hendak dikatakan oleh pengarang, maka sejarawan baru menetapkan apa yang menjadi kesaksian saksi. ia masih harus menetapkan kesaksian itu kredibel, dan jika memang demikian, sejauh mana¹⁵

Langkah pertama dalam kritik intern yaitu menentukan sifat sumber itu (apakah resmi/formal atau tidak resmi/formal). Langkah kedua yaitu menyoroiti penulis sumber tersebut sebab dia yang memberikan informasi

¹³ Sulasaman. *Metodologi Penelitian Sejarah...*, hlm.101.

¹⁴ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah*, (Jogjakarta : Ombak, 2012) hlm.14-106.

¹⁵ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah...*, hlm. 113-115.

yang dibutuhkan, dipastikan bahwa kesaksiannya dapat dipercaya. Dan ketiga, membandingkan kesaksian dari berbagai sumber dengan menjajarkan kesaksian para saksi yang tidak berhubungan satu dan yang lainnya sehingga informasi yang diperoleh objektif.¹⁶

Dalam memahami sebuah konsep diatas, penulis berusaha menerapkan dengan semaksimal mungkin terhadap sumber yang telah didapatkan dari lapangan, diantara sumber-sumber itu adalah sebagai berikut :

b. Sumber Tertulis

1) Arsip / Dokumen

- a) Dekrit Presiden Republik Indonesia / Panglima Tertinggi Angkatan Perang Tentang Kembali Kepada Undang-Undang Dasar 1945. 5 Juli 1959. Kementrian Penerangan RI. Pada tahap kritik eksternal dokumen tersebut dokumen yang disusun dan diterbitkan oleh Kementerian Penerangan RI dan tersimpan di ANRI dipastikan sumber ini merupakan sumber turunan, dan dokumen tersebut masih menggunakan ejaan dahulu. Secara intern dokumen tersebut memang betul Dekrit Presiden RI / Panglima tertinggi Angkatan Perang yang berisi pernyataan tentang kembali kepada UUD 1945, pembubaran konstituante dan pembentukan MPRS dan DPAS, disertai tanda tangan asli dari Presiden Soekarno. Dengan demikian

¹⁶ Helius Sjamsudin, *Metodologi Sejarah...*, hlm. 113-115.

sumber tersebut merupakan asli. Dan merupakan sumber Primer karena langsung dibuat oleh pemerintah

- b) Pidato Presiden Soekarno Pada Upacara Penyerahan Kembali Mandat Kabinet Karya Kedalam Tangan Beliau, Istana Merdeka 6 Juli 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara eksternal naskah tersebut masih utuh dan tersimpan baik di ANRI. Dengan kondisi kertas yang masih asli yang sudah berwarna kuning tinta yang digunakannya pun menggunakan tinta yang awet sehingga tulisannya tidak luntur dan masih jelas terbaca sehingga tidak ada informasi yang hilang. Arsip tersebut masih menggunakan ejaan dahulu, dan ketikannya menggunakan mesin tik, arsip tersebut dibuat pada tahun 1959 dan juga merupakan sumber yang berbentuk formal. Dari segi internal arsip tersebut berisi tentang penyerahan kembali kabinet karya kepada Presiden Soekarno setelah pendekritan UUD 1945 dan tak berlakunya UUDS 1950. Dengan demikian sumber tersebut merupakan asli bukan salinan. Dan merupakan sumber Primer karena langsung dibuat oleh presiden Soekarno.
- c) Pidato Presiden Soekarno Pada Upacara pelantikan Anggota Kabinet Kerja, Istana Merdeka 10 Djuli 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara eksternal arsip tersebut masih utuh dan tersimpan baik di ANRI. Dengan kondisi kertas yang masih asli yang sudah berwarna kuning tinta yang

digunakannya pun menggunakan tinta yang awet sehingga tulisannya tidak luntur dan masih jelas terbaca sehingga tidak ada informasi yang hilang. Arsip tersebut masih menggunakan ejaan dahulu, dan ketikannya menggunakan mesin tik, arsip tersebut dibuat pada tahun 1959 dan juga merupakan sumber yang berbentuk formal, dari segi internal arsip tersebut berisi tentang pelantikan menteri kabinet kerja yang diangkat oleh Presiden Soekarno pasca pendekritan UUD 1945. Dengan demikian sumber tersebut merupakan asli bukan salinan. Dan merupakan sumber Primer karena langsung dibuat oleh presiden Soekarno.

- d) Pidato Presiden Soekarno Pada Upacara Pelantikan Menteri Menteri Muda Daripada Kabinet Kerja, Istana Bogor 13 Juli 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara eksternal arsip tersebut masih utuh dan tersimpan baik di ANRI. Dengan kondisi kertas yang masih asli yang sudah berwarna kuning tinta yang digunakannya pun menggunakan tinta yang awet sehingga tulisannya tidak luntur dan masih jelas terbaca sehingga tidak ada informasi yang hilang. Arsip tersebut masih menggunakan ejaan dahulu, dan ketikannya menggunakan mesin tik, arsip tersebut merupakan sumber yang berbentuk formal karena dikeluarkan dalam acara resmi pemerintahan. Dari segi internal arsip tersebut berisi tentang pelantikan

menteri kabinet kerja yang diangkat oleh Presiden Soekarno pasca pendekritan UUD 1945. Dengan demikian sumber tersebut merupakan asli bukan salinan. Dan merupakan sumber Primer yang penulis butuhkan.

- e) Pidato Presiden Soekarno Pada Pelantikan Anggota-Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Dewan Perancang Nasional dan Pengawas Kegiatan Aparatur-Aparatur Negara di Istana Negara 15 Agustus 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia. Secara eksternal arsip tersebut masih utuh dan tersimpan baik di ANRI. Dengan kondisi kertas yang masih asli yang sudah berwarna kuning tinta yang digunakannya pun menggunakan tinta yang awet sehingga tulisannya tidak luntur dan masih jelas terbaca sehingga tidak ada informasi yang hilang. Arsip tersebut masih menggunakan ejaan dahulu, dan ketikannya menggunakan mesin tik, arsip tersebut dibuat pada tahun 1959 dan juga merupakan sumber yang berbentuk formal, dari segi internal arsip tersebut berisi tentang pidato Presiden Soekarno pada pelantikan Anggota-Anggota Dewan Pertimbangan Agung Sementara, Dewan Perancang Nasional dan Pengawas Kegiatan Aparatur-Aparatur Negara oleh Presiden Soekarno yang direncanakan dalam dekrit Presiden 05 Juli 1959. Dengan demikian sumber tersebut merupakan

asli bukan salinan. Dan merupakan sumber Primer yang penulis butuhkan

- f) Terjemah Presiden Soekarno Mengenai Demokrasi Terpimpin Dimuka Kursus Atase Militer, Istana Negara 16 April 1959. Arsip Nasional Republik Indonesia. Dilihat secara eksternal naskah tersebut masih utuh dan tersimpan baik di ANRI. Dengan kondisi kertas yang masih asli yang sudah berwarna kuning, tinta yang digunakannya pun menggunakan tinta yang awet sehingga tulisannya tidak luntur dan masih jelas terbaca sehingga tidak ada informasi yang hilang. Arsip tersebut masih menggunakan ejaan dahulu, dan ketikannya menggunakan mesin tik, arsip tersebut dibuat pada tahun 1959 dan juga merupakan sumber yang berbentuk formal. Adapun dilihat secara internal naskah tersebut berisi pemikirn pemikiran objektif Presiden Soekarno mengenai Demokrasi terpimpin yang disampaikan pada kursus Atase Militer di Istana Negara pada tanggal 16 April 1959. Dapat disimpulkan bahwa naskah tersebut merupakan sumber primer yang dibutuhkan oleh penulis.
- g) Susilo Suharto. 1961. Ictisar Manipol Usdek. Malang. Dilihat secara eksternal dokumen ini merupakan dokumen yang disusun berbentuk buku. Dokumen ini asli terbit pada tahun 1961 dengan kondisi kertas yang sudah berwarna kuning

dengan ejaan tulisan yang belum di sederhanakan. Adapaun dilihat secara internal dokumen ini merupakan ikhtisar manipol usdek yang disusun oleh Susilo Suharto. Manipol usdek ini adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk menjalankan demokrasi terpimpin selain itu juga dalam dokumen ini dihimpun bersama UUD 1945, Piagam Jakarta, Pokok-pokok kembali pada UUD 1945 dan lahirnya Pancasila. Dapat disimpulkan sumber ini merupakan sumber sekunder yang dibutuhkan karena sezaman dengan kajian yang diteliti oleh penulis.

- h) Indonesia Pilihlah Demokrasimu (Pidato Presiden Soekarno Pada hari Sumpah Pemuda TGL. 28 Oktober 1956 dan Pidato Presiden Soekarno Pada resepsi Konngres PGRI ke-8 tgl. 30 Okt. 1956) : Jajasan Prapantja. Dilihat secara eksternal dokumen ini merupakan dokumen yang asli yang dibuat pada tahun 1956 dengan kondisi kertas yang berwarna kuning dan hampir mengalami kerusakan dengan ejaan yang belum disempurnakan dan bisa disebut dokumen ini merupakan sumber yang berbentuk formal karena dikeluarkan oleh pemerintah. Secara internal dokumen ini berisi pemikiran-pemikiran Soekarno mengenai demokrasi dan juga didalamnya disinggung mengenai gagasan untuk menguburkan partai partai yang pada saat itu cukup banyak partai-partai politik

yang ikut dalam pemerintahan. Dapat disimpulkan sumber ini merupakan sumber primer yang penulis butuhkan.

- i) *Res Publica lagi, Res Publica Amanat Presiden* Kepada sidang pleno konstituante 22 April 1959. Departemen Penerangan RI. Dinilai secara eksternal arsip ini merupakan arsip yang dikeluarkan oleh Kementrian Penraran RI dengan cetakan khusus pada tahun 1959. dengan kodisi kertas yang berwarna kuning terlihat sudah lama, dalam tulisannya masih menggunakan ejaan yang masih belum disempurnakan. Bisa dikatakan arsip ini merupakan arsip yang asli dicetak oleh percetakan negara. Adapun dinilai secara internal arsip ini berisi amanat Presiden Soekarno kepada sidang pleno Konstituante di Bandung pada tanggal 22 April 1959 mengenai anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 dan membubarkan Badan Konstiuanate yang kurang berhasil untuk merumuskan UUD baru yang sebelumnya mengguakan UU DS 1950. Dapat disimpulkan secara eksternal dan internal sumber ini merupakan sumber primer yang penulis butuhkan karena berisi gagasan asli Presiden Soekarno yang kemudian gagasan ini direalisasikan dalam dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2) Majalah

- a. Panji masyarakat. "*Demokrasi Kita*". edisi 4 Mei 1960 oleh Dr. Mohammad Hatta. Dinilai secara eksternal majalah ini

merupakan majalah asli dengan kondisi kertas yang agak kasar dan berwarna kuning yang tersimpan baik di Perpustakaan Nasional dengan ejaan tulisan yang masih belum belum disempurnakan. Dan Secara internal artikel yang ditulis dalam majalah ini yang berjudul Demokrasi Kita merupakan tulisan dan gagasan asli dari Mohaammad Hatta sebagai bentuk kritik terhadap kebijakan dan tindakan-tindakan Presiden Soekarno. Dipastikan sumber ini merupakan sumber primer yang penulis butuhkan dalam penelitian ini.

- b. Hikmah "*Dualisme Dalam Kepemimpinan di Indonesia*" edisi 15 Agustus 1959. Secara eksternal majalah ini merupakan majalah yang asli terbit pada tahun 1959 dengan kondisi kertas yang sedikit rusak dan berwarna kuning dengan ejaan tulisan yang masih belum disempurnakan majalah ini tersimpan baik di perpustakaan Nasional RI. Secara internal artikael yang ditulis dalam majalah ini dengan judul Dualisme Kepemimpinan di Indonesia sangat berkaitan dengan topik kajian yang sedang penulis teliti berkaitan dengan politik Indonesia. Dipastikan sumber ini merupakan sumber sekunder yang penulis butuhkan karena terbit sezaman dengan peristiwa yang terjadi pada tahun 1959.
- c. Hikmah "*Konstituante Dalam Ujian*" . Majalah Edisi 16 Mei 1959. Secara eksternal majalah ini merupakan majalah yang

asli terbit pada tahun 1959 dengan kondisi kertas yang sedikit rusak dan berwarna kuning dengan ejaan tulisan yang masih belum disempurnakan majalah ini tersimpan baik di perpustakaan Nasional RI. Dilihat secara internal artikel yang ditulis dalam majalah ini dengan judul “Konstituante dalam ujian”, menjelaskan kondisi Badan Konstituante yang dalam proses perkerjaannya merumuskan UUD mengalami kemacetan sehingga Presiden Soekarno mengamanatkan dan menganjurkan untuk kembali kepada UUD 1945. Dapat disimpulkan sumber ini merupakan sumber primer yang penulis butuhkan karena berkaitan kondisi politik Indonesia pada tahun 1959.

- d. Hikmah “*Betapakah Jadinya Demokrasi Terpimpin itu?*”. Majalah Edisi 29 Januari 1959. Secara eksternal majalah ini merupakan majalah yang asli terbit pada tahun 1959 dengan kondisi kertas yang sudah berwarna kuning dengan ejaan tulisan yang masih belum disempurnakan majalah ini tersimpan baik di perpustakaan Nasional RI. Adapun secara internal artikel yang dimuat dalam majalah ini merupakan ungkapan pertanyaan mengenai bagaimana sesungguhnya pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam mewujudkan Indonesia adli dan makmur. Dipastikan sumber ini merupakan

sumber sekunder karena bukan pelaku langsung tapi terbit sezaman dengan topik yang penulis kaji.

- e. Hikmah “*Saat Yang Menentukan Dalam Konstituante Tentang Dasar Negara.*” Majalah Islam Populer. Edisi 29 Januari 1959. Secara eksternal majalah ini merupakan majalah yang asli terbit pada tahun 1959 dengan kondisi kertas yang sedikit rusak dan berwarna kuning dengan ejaan tulisan yang masih belum disempurnakan. Majalah ini tersimpan baik di perpustakaan Nasional RI. Secara internal artikel yang dimuat dalam majalah ini menjelaskan mengenai persoalan-persoalan yang ada dalam konstituante di mana kedua blok antara golongan Islam dan Pancasila tetap bersikukuh pada pendiriannya tentang dasar negara sehingga dalam merumuskan dasar negara konstituante mengalami kendala karena tidak menemukan titik temu dalam persidangan. Dapat disimpulkan sumber ini merupakan sumber sekunder yang penulis butuhkan.

3) Buku

- a. Penilaian buku yang berjudul “Demokrasi Kita” karangan Mohammad Hatta. Buku ini merupakan buku yang awalnya merupakan tulisan Muhmmad Hatta yang dimuat dalam majalah panji masyarakat pada tahun 1960 sebagai bentuk kritikan terhadap pemerintahan demokrasi dipimpin presiden

Soerkarno. Dilihat dari segi ekstern, buku ini merupakan sumber yang dibutuhkan dan berkaitan dengan Muhammad Hatta. Penulis mendapat buku ini berupa *foto copy* yang dicetak ulang kembali oleh penerbit Segarsy tahun 2014 dari buku aslinya. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 1966 oleh PT. Pustaka Antara. Artinya buku ini diterbitkan sezaman dengan apa yang dikaji oleh penulis. Dilihat dari segi intern, buku ini terbukti bahwa tulisan yang dipaparkan merupakan gambaran objektif, dan ungkapan secara menyeluruh oleh Muhammad Hatta sebagai tokoh nasional yang pernah menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa buku tersebut merupakan sumber primer yang dibutuhkan oleh penulis.

- b. Penilaian terhadap buku “Memoir” karya Muhammad Hatta. Buku ini merupakan otobiografi yang ditulis langsung oleh Muhammad Hatta yang dicetak pertama kali pada tahun 1983 oleh penerbit Tintamas Jakarta. Dilihat dari segi ekstern buku ini merupakan buku asli yang terbit pertama kali, kondisi kertasnya pun berwarna kuning terlihat sudah lama. Dan dilihat dari segi intern buku ini asli merupakan ungkapan Muhammad Hatta tentang riwayat hidupnya. Sejak ia lahir hingga Mohammad Hatta menjadi wakil presiden yang sekaligus menjadi perdana menteri Indonesia masa Demokrasi

Parleментар. Dapat disimpulkan buku yang berjudul *Memoir* yang ditulis oleh Muhammad Hatta ini merupakan sumber primer yang penulis butuhkan.

- c. Penilaian terhadap buku yang berjudul “*Surat Menyurat Hatta dan Anak Agung (Menjungjung Tinggi Keagungan Demokrasi dan Mengutuk Kelaliman Diktatur)*” Karya Hatta dan Anak Agung. Buku ini terbit pertama kali oleh penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta pada tahun 1987 dengan kondisi buku yang masih utuh dan belum mengalami kerusakan sehingga isinya pun tak berubah. Secara internal buku ini merupakan kumpulan surat menyurat Hatta dengan Anak Agung yang sedang ditahan dipenjara pada saat masa demokrasi terpimpin karena pemikirannya bersebrangan dengan pemerintah. Dapat disimpulkan buku ini merupakan sumber primer yang penulis butuhkan.
- d. Penilaian terhadap buku yang berjudul *Hati Nurani Melawan Kedzaliman (Surat-Surat Bung Hatta Kepada Presiden Soekarno 1957-1965)*, Dilihat secara eksternal buku ini merupakan buku yang asli terbit pertama pada tahun 1986 oleh penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta dengan kondisi kertas yang masih baik dan masih bisa dibaca dengan baik. Dilihat secara internal buku ini merupakan kumpulan surat-menyurat Hatta dengan Presiden Soekarno pada tahun 1957-

1965 yang kemudian dihimpun menjadi sebuah buku oleh Muhtar Lubis. Surat-surat yang ditulis oleh Hatta ini merupakan sebuah bentuk kritik terhadap kebijakan politik Presiden Soekarno pada masa demokrasi terpimpin. Dapat disimpulkan buku ini merupakan sumber primer yang penulis butuhkan.

- e. Penilaian terhadap buku Muhammad Hatta: *Biografi Politik* yang ditulis oleh Deliar Noer yang diterbitkan oleh LP3ES pada tahun 1990. Dilihat dari segi ekstern buku ini terbit pertama kali pada tahun 1990 kondisi kertasnya pun asli terbit pada tahun tersebut. Dilihat dari segi intern buku ini ditulis langsung oleh Deliar Noer. Beliau ini merupakan pakar politik yang pernah berjumpa dengan Muhammad Hatta dan menjadi staf ahli presiden tahun 1966-1968. Dalam buku tersebut Deliar Noer menuliskan perjalanan Politik Muhammad Hatta studi Hatta di Belanda hingga masa orde baru. Termasuk di dalamnya dungkapkan tentang sikap Hatta terhadap Demokrasi terpimpin. Dapat disimpulkan buku Muhammad Hatta: *Biografi Politik* yang ditulis oleh Deliar Noer ini merupakan sumber sekunder yang penulis butuhkan.

3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap menafsirkan atau memberi makna kepada fakta-fakta (*facts*) atau bukti-bukti sejarah (*evidences*). Hal ini diperlukan karena pada dasarnya bukti-bukti sejarah sebagai saksi (*witness*) realitas di masa lampau hanyalah saksi-saksi bisu belaka.¹⁷ Sedangkan menurut Sulasman (2014:107), interpretasi adalah menguraikan fakta-fakta sejarah dan kepentingan topik sejarah serta menjelaskan masalah kekinian¹⁸.

Interpretasi sejarah menurut Abdurrahman, pada prosesnya seorang sejarawan harus berusaha mencapai pengertian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa. Data sejarah terkadang mengandung beberapa sebab yang membantu dalam mencapai hasil berbagai bentuknya. Walaupun suatu sebab dapat mengantarkan pada hasil yang berlawanan di lingkungan lain. Oleh karena itu, interpretasi dapat dilakukan dengan cara membandingkan data untuk menyingkap peristiwa-peristiwa yang terjadi pada waktu yang sama. Jadi, untuk mengetahui sebab-sebab dalam peristiwa sejarah diperlukan pengetahuan tentang masa lalu, sehingga saat penelitian peneliti akan mengetahui situasi pelaku, tindakan, dan tempat peristiwa itu.¹⁹

Interpretasi atau penafsiran sejarah sering disebut dengan analisis sejarah. Analisis dan sintesis merupakan dua hal penting dalam tahap interpretasi. Analisis yaitu penguraian terhadap fakta yang didapatkan, analisis bertujuan untuk melakukan penafsiran atas fakta-fakta yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah dan bersama dengan teori disusun menjadi interpretasi.

¹⁷ Daliman. *Metode Penelitian Sejarah*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012), hlm. 81.

¹⁸ Sulasman, *Mertode Penelitian Sejarah...*, hlm. 107.

¹⁹ Sulasman, *Mertode Penelitian Sejarah...*, hlm.113.

Sedangkan sintesis adalah proses menyatukan semua fakta yang telah diperoleh sehingga tersusun sebuah kronologis peristiwa dalam bentuk rekonstruksi sejarah.²⁰

Dalam menerapkan konsep di atas tersebut, penulis mencoba menafsirkan fakta-fakta yang telah terkumpul tersebut dan berupaya melakukan distansiasi (penjarakan) untuk meminimalisir subyektifitas. Dalam hubungannya dengan judul yang diambil, yang intinya mengenai “Respon Mohammad Hatta Terhadap Dekrit Presiden 05 Juli 1959.”

Tahapan – tahapan yang telah dilalui ini merupakan sebuah landasan sebagai penyusunan kerangka teoritis yang berfungsi untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan serta memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian ini. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan konsep *check and balances* dalam demokrasi.

Konsep *check and balances* merupakan suatu konsep ketatanegaraan yang menghendaki agar kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain. Kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara negara ataupun pribadi-pribadi yang sedang menduduki jabatan dalam lembaga-lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi. Mekanisme *check and balances* dalam suatu demokrasi merupakan suatu hal yang sangat diperlukan. Karena dapat menghindari penyalahgunaan kekuasaan juga terpusatnya kekuasaan oleh

²⁰ Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013). hlm.103-104.

seseorang ataupun sebuah institusi, karena dengan mekanisme seperti ini, antara istitusi yang satu dengan yang lainnya akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.²¹

Salah satu elemen penting untuk membangun pemerintahan yang demokratis dan terciptanya *check and balances*, yaitu perlu adanya peran oposisi. Karena unsur oposisi dapat menjadi kekuatan pengontrol dan penyeimbang dalam pelaksanaan pemerintahan di suatu negara, sehingga pemerintahan dapat dicegah untuk tidak terjerumus ke dalam penyelewengan kekuasaan.²²

Jika dihubungkan dengan penelitian ini, yaitu Respon Muhammad Hatta terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka tindakan Muhammad Hatta dengan mengkritik kebijakan pemerintah melalui karya tulisnya itu bisa dikatakan Hatta berperan sebagai pihak oposisi. Jadi adanya kritik dari Muhammad Hatta ini sebagai pengontrol dan penyeimbang kekuasaan adalah sah dijadikan sebagai bagian dari *cheks and balances* dari negara demokrasi.

Konsep ini diterapkan untuk mengungkap bagaimana Mohammad Hatta mengkritik kebijakan Presiden Soekarno sebagai bentuk respon dari setiap kebijakan dan tindakan-tindakannya. Kritik yang dilakukan Hatta itu tiada lain ialah sebagai pengontrol untuk mencapai keseimbangan atau kestabilan dalam pemerintahan negara Republik Indonesia.

²¹ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006) hlm. 89.

²² Bedjo Sukarno, *Peran Oposisi sebagai Cheks and Balance dalam Sistem Politik Demokrasi di Indonesia*, Jurnal FISIP UNISRI. hlm. 10.

Kritik merupakan suatu penganalisaan dan pengevaluasian tentang sesuatu dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, memperluas apresiasi, atau membantu memperbaiki pekerjaan. Sedangkan Kebijakan politik merupakan segala sesuatu hasil keputusan baik berupa dalam sistem maupun dalam tindakan. Kebijakan selalu berhubungan dengan keputusan-keputusan pemerintah yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat melalui instrument-instrument kebijakan yang dimiliki oleh pemerintah berupa hukum, pelayanan transfer dana, pajak dan anggaran-anggaran serta memiliki arahan-arahan yang bersifat otoritatif untuk melaksanakan tindakan-tindakan pemerintah di dalam yurisdiksi nasional, regional, unisipaal, dan lokal.²³

Dari hasil interpretasi ini dapat disimpulkan bahwa , selama tahun 1957 - 1959 banyak terjadi pertentangan antara Soekarno dan Hatta. Pertentangan tersebut akhirnya mendorong Hatta memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, yang dijabatnya tahun 1945. Meskipun Hatta telah menjadi warga negara biasa kembali, akan tetapi perhatiannya dan rasa tanggung jawabnya terhadap negara dan bangsa Indonesia, serta terhadap nasib rakyat kecil Indonesia sama sekali tidak berkurang.²⁴

Dalam masa tahun 1959 – 1965 Muhammad Hatta tak tinggal diam ia terus memantau dan memperhatikan kebijakan-kebijakan Presiden Soekarno

²³ Istanto, Y. D. (t.thn.). *Kebijakan Politik*. Dipetik Maret 06, 2019, dari Scienceshelter: <http://scienceshelter.wordpress.com/pengetahuan-umum/kebijakan-politik/kebijakan-politik/>.

²⁴ Muhtar Lubis. *Hati Nurani Melawan Kedzaliman surat-surat Bung Hstts Kepada Presiden Soekarno 1967-1965*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1986) hlm. 13.

baik dalam bidang ekonomi maupun politik. dan ternyata banyak kebijakan yang menurut Hatta bertentangan dan merugikan rakyat. Salah satu kebijakan yang ditentang oleh Muhammad adalah dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Satu tahun kemudian pada tahun 1960 Mohammad Hatta menulis Artikel yang berjudul Demokrasi Kita yang diterbitkan oleh Majalah Panji Masyarakat. Hal itu dilakukan Hatta sebagai bentuk kritik terhadap tindakan-tindakan presiden.

Dalam tulisan tersebut Hatta mengungkapkan bahwa “tindakan-tindakan pemerintah sangat bertentangan dengan Undang-undang Dasar. Presiden yang menurut Undang-Undang Dasar 1950 adalah Presiden Konstitusional yang tidak bertanggungjawab dan tidak dapat diganggu gugat mengangat dirinya sebagai Formatur Kabinet. Dengan ini ia melakukan suatu tindakan yang bertanggung jawab dengan tidak memikul tanggung jawab”²⁵

Selain itu, Hatta menyatakan bahwa pembubaran konstituante pada bulan Juli yang bersamaan dengan pendekritan UUD 1945. sebagai suatu “*coup d’etat*” atau kudeta konstitusional tetapi dengan kesal ia melihat bahwa ini dibenarkan oleh partai-partai dan suara terbanyak di DPR. Dengan demikian, DPR sudah melepaskan sendiri hak kelahirannya. Karena memang DPR tersebut lahir dari pemilihan umum yang diatur berdasarkan UUD 1950.²⁶

DPR sendiri akhirnya dibubarkan, dan DPR baru disusun dengan jumlah kursi 261, terdiri atas separuh orang partai (131 orang) dan separuh lainnya (130 orang yang fungsional). Alasan Soekarno melakukan ini adalah karena

²⁵ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita...*, hlm. 3.

²⁶ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita...*, hlm. 3.

revolusi belum selesai, tetapi Hatta menilai bahwa dengan pembubaran DPR berdasar pemilihan umum, lenyaplah sisa-sisa demokrasi yang penghabisan²⁷. Demokrasi Terpimpin yang dikembangkan Soekarno menjadi suatu diktator yang didukung oleh golongan-golongan tertentu.

4. Historiografi

Tahapan akhir dalam metode penelitian sejarah adalah historiografi (penulisan sejarah). Historiografi adalah proses penyusunan fakta sejarah dari berbagai sumber yang telah diseleksi dalam bentuk penulisan sejarah.²⁸ Dengan demikian historiografi adalah tahapan lanjutan dari interpretasi yang kemudian hasilnya dituliskan menjadi kisah yang menarik. Jika dilihat pada tahapan- tahapan ini tidaklah mengherankan apabila dikatakan bahwa kerja seorang sejarawan untuk menghasilkan sebuah karya ilmiah sangat bernilai historis.²⁹ Pada tahapan ini, semua data yang telah terkumpul dan telah melewati tahapan kritik dan pentafsiran, kemudian ditulis menjadi sebuah kisah atau peristiwa sejarah yang selaras dengan sumber – sumber dan data yang telah terhimpun dengan menggunakan jenis penulisan deskriptif naratif. Pada proses penyusunannya, penulis berharap dapat menemukan dan mengungkapkan fakta – fakta baru dalam merekonstruksi sejarah. Adapun sistematika penulisan skripsi atau penelitian sejarah ini akan dibahas sebagai berikut:

²⁷ Muhammad Hatta, *Demokrasi Kita...*, hlm. 3.

²⁸ Sulasaman, *Metodologi Sejarah...*, hlm. 9.

²⁹ Herlina, Nina Lubis, *Metode Sejarah...*, hlm.55.

Bab pertama penulis akan menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan langkah-langkah penelitian (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi). Dalam bab ini digunakan untuk mengarahkan pembaca pada tahap langkah-langkah penelitian sebagai pijakan pembahasan berikutnya.

Bab dua membahas mengenai bagaimana Dekrit Presiden 05 Juli 1959. Di dalamnya diuraikan terlebih dahulu bagaimana kondisi politik Indonesia sebelum dikeluarkannya Dekrit Presiden. yang kedua mengenai isi dan pelaksanaan dekrit Presiden tahun 1959.

Bab tiga menguraikan tentang Respon Muhammad Hatta terhadap dekrit Presiden 05 Juli 1959 yang di dalamnya akan diuraikan terlebih dahulu biografi politik Muhammad Hatta, dan yang kedua respon Hatta terhadap Dekrit Presiden 05 juli 1959

Bab empat penulis akan menguraikan kesimpulan. kesimpulan disini adalah menyimpulkan dari seluruh pembahasan yang penulis kaji di bab kedua dan ketiga. Setelah menyimpulkan, penulis akan menguraikan daftar sumber atau daftar pustaka.